

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS (PPDS) TERHADAP PELIMPAHAN
WEWENANG DOKTER SPESIALIS DALAM
PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT
(Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil
Padang Bagian Obstetri dan Ginekologi)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)



Disusun Oleh:

**NADIA TIARA SYAHREDI ADNANI
NIM : 2120112016**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H
Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS (PPDS) TERHADAP PELIMPAHAN
WEWENANG DOKTER SPESIALIS DALAM
PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT
(Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil
Padang Bagian Obstetri dan Ginekologi)**

(NADIA TIARA SYAHREDI ADNANI, 2120112016, Fakultas Hukum Unand, 2021, 114
Halaman) Pembimbing: Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H dan Dr. Yussy Adelina Mannas,

S.H., M.H

ABSTRAK

Profesi dokter merupakan profesi yang membutuhkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan klinis yang pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan dan etika yang berlaku. Persoalan hukum yang dapat timbul dari pelayanan Rumah Sakit ketika tindakan medis yang seharusnya dilakukan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) tetapi dilakukan oleh dokter umum yang berjaga. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum Dokter PPDS terhadap pelimpahan wewenang dokter spesialis dalam pelayanan Medis Darurat di Rumah Sakit? 2) Bagaimana akibat hukum atas pelimpahan kewenangan medis dari dokter spesialis (DPJP) kepada dokter PPDS yang mengakibatkan kegagalan upaya medis bagi pasien? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai tujuannya adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif sesuai dengan kenyataan atau fakta. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah *library research* dan *field research*. Data dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data yang diperoleh diolah melalui editing dan koding, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan: 1) Perlindungan bagi PPDS yaitu, ketika semua prosedur telah dilakukan oleh PPDS mulai dari observasi pasien, memutuskan level supervise darurat terhadap suatu tindakan medis, dan meminta izin tindakan medis serta melaporkan hasil observasi kepada DPJP tidak menjadikan tanggung jawab sepenuhnya bagi PPDS, melainkan tanggung jawab PPDP yang merupakan pendamping PPDS di Rumah Sakit. 2) Tanggung jawab hukumnya berada pada dokter spesialis sebagai pemberi pelimpahan sepanjang tindakan kedokteran yang dilakukan dokter jaga sesuai dengan intruksi/arahan spesialis, dalam hal dokter jaga melakukan tindakan kedokteran tidak sesuai dengan intruksi/arahan spesialis maka akibat hukum atas kegagalan upaya medis tersebut menjadi tanggung jawab personal oleh dokter jaga.

Kata Kunci: Dokter, PPDS, DPJP, Rumah Sakit

LEGAL PROTECTION OF DOCTORS SPECIALIST EDUCATION PROGRAM AGAINST THE DELEGATION OF AUTHORITY OF SPECIALIST DOCTORS IN

MEDICAL SERVICES AT HOSPITALS

(Case Study at dr. M. Djamil Central General Hospital Padang Department of Obstetrics and Gynecology)

(NADIA TIARA SYAHREDI ADNANI, 2120112016, Faculty of Law Unand, 2021, 114 Pages) Supervisor: Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H dan Dr. Yussy Adelina Mannas,

S.H., M.H

ABSTRACT

The medical profession is a profession that requires mastery of clinical knowledge and skills whose implementation is in accordance with applicable rules and ethics. Legal issues that can arise from hospital services when the medical action that should be carried out by the doctor in charge of the patient is carried out by a general practitioner on duty. Emergency Medical services at the Hospital? 2) What are the legal consequences for the delegation of medical authority from specialist doctors to Doctors Specialist Education Program doctors which results in the failure of medical efforts for patients? The approach method used in this research according to its purpose is a juridical-empirical approach. The juridical-empirical approach is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in accordance with reality or facts. The data used are primary data and secondary data. The data sources in this research are library research and field research. Data is collected through document studies or library materials. The data obtained was processed through editing and coding, then analyzed using qualitative analysis. Furthermore, the data is presented descriptively. Based on the results of the study, the authors conclude: 1) Protection for Doctors Specialist Education Program doctors, that is, when all procedures have been carried out by Doctors Specialist Education Program doctors starting from patient observation, deciding the level of emergency supervision of a medical action, and requesting permission for medical action and reporting the results of observations to the doctor in charge of the patient does not make responsibility full responsibility for Doctors Specialist Education Program doctors, but the responsibility of doctor in charge of the patient who is a Doctors Specialist Education Program doctors assistant at the Hospital. 2) The legal responsibility rests with the specialist doctor as the delegation provider as long as the medical action carried out by the doctor on duty is in accordance with the specialist's instructions/directions, in the event that the doctor on duty performs the medical action not in accordance with the specialist's instructions/direction, then the legal consequences for the failure of the medical effort will be borne by the personal answer by the doctor on duty.

Keywords: Doctor, Doctors Specialist Education Program Doctors, Doctor in Charge of The Patient, Hospital.